



No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Kabupaten Sumba Tengah	102.895.261,00	7.003.220,00	6,81
21	Kabupaten Sabu Raijua	3.202.080,00	1.540.480,00	48,11
22	Kabupaten Malaka	150.729.040,00	7.712.768,00	5,12
Jumlah		2.500.000.000,00	272.730.509,00	10,91

3. Lain-lain PAD yang sah bersumber dari Badan Keuangan Daerah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan Jasa Giro terealisasi senilai Rp4.921.397.964,48 atau 20,94% dari target yang ditetapkan senilai Rp23.500.000.000,00.
- Pendapatan Bunga yang merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah terealisasi senilai Rp541.839.698,00 atau 2,35% dari target yang ditetapkan senilai Rp23.028.733.000,00.
- Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Bendahara terealisasi senilai Rp2.925.140.462,35,00 atau 91,41% dari target yang ditetapkan senilai Rp3.200.000.000,00.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp11.699.532.916,71 atau 1.161,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.007.000.000,00.

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp5.432.056.171,78 atau 2.172,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp250.000.000,00

b. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Transfer - LRA	Rp 3.053.836.755.861,00	Rp 4.000.655.446.445,00

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pemerintah Pusat - LRA	Rp3.039.880.514.861,00	Rp3.993.215.834.445,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana Perimbangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp3.110.242.996.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terealisasi senilai Rp3.053.836.755.861,00 atau 98,19% dari target yang ditetapkan. Namun



pendapatan yang diterima melalui Kas Daerah senilai Rp2.513.102.880.200,00. Sementara selisih senilai Rp540.733.875.661 merupakan pendapatan transfer yang tidak masuk ke Kas Daerah, antara lain: (a) kewajiban bunga-bunga atas pinjaman Pemprov. NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp35.642.958.560,00, (b) Pengembalian sisa Dana BOS tahun 2019 senilai Rp113.960.000,00 dan Dana BOS yang ditransfer langsung ke Rekening sekolah senilai Rp504.976.957.101,00. Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
- Bagi Hasil (DBH)	Rp65.358.865.115,00	Rp77.108.302.308,00

Dana Transfer Umum – Bagi Hasil (DBH) terealisasi senilai Rp65.358.865.115,00 atau 105,95% dari target yang ditetapkan senilai Rp61.686.186.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp7.113.057.810,00 atau 124,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.704.286.000,00.
- DBH PPh Pasal 21 terealisasi senilai Rp49.728.728.555,00 atau 1.991,85% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.496.614.000,00.
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi senilai Rp4.700.866.575,00 atau 10,06% dari target yang ditetapkan senilai Rp46.720.716.000,00.
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp1.149.511.671,00 atau 22,29% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.158.057.000,00.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi terealisasi senilai Rp1.233.913.000,00 atau 102,21% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.207.231.000,00.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi senilai Rp1.414.260.151,00 atau 358,54% dari target yang ditetapkan senilai Rp394.453.000,00.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi senilai Rp18.527.353,00 atau 383,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.829.000,00.

b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.730.933.330.000,00	Rp1.726.712.089.000,00



Dana Alokasi Umum terealisasi senilai Rp1.730.933.330.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.730.933.330.000,00. Total realisasi DAU yang ditransfer ke Kas daerah hanya senilai Rp1.695.176.411.440,00. Hal ini dikarenakan nilai Rp35.642.958.560,00 merupakan kewajiban bunga atas pinjaman Pemprov. NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan nilai Rp113.960.000,00 yang merupakan sisa Dana BOS tahun 2019 yang tidak di distribusikan ke sekolah penerima sampai dengan tahun 2021. Pemotongan terdapat DAU atas pengembalian bunga pinjaman termasuk pemotongan sisa dana BOS sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/KM.7/2022 Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Februari sampai dengan Bulan Desember tahun 2022.

c)	Dana Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Khusus – Dana	Rp1.243.588.319.746,00	Rp389.869.595.643,00
	Alokasi Khusus (DAK)		

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi senilai Rp487.528.050.506,00 atau 97,81% dari target yang ditetapkan senilai Rp498.425.871.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi DAK Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	14.118.029.000,00	15.687.997.535,00	111,12
2	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	99.530.015.000,00	112.744.625.208,00	113,28
3	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.002.356.000,00	12.570.065.500,00	29,23
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	25.612.303.000,00	30.830.761.265,00	120,37
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	13.143.104.000,00	13.142.961.354,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.019.841.000,00	24.157.731.117,00	96,55
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.100.616.000,00	18.488.099.210,00	108,11
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	507.691.000,00	480.000.428,00	94,55
10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	22.437.508.000,00	22.437.246.000,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	237.954.408.000,00	236.988.562.889,00	99,59
	Jumlah	498.425.871.000,00	487.528.050.506,00	97,81

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi senilai Rp756.060.269.240,00 atau 93,89% dari target yang ditetapkan senilai Rp805.241.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.13 Realisasi DAK Non Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.812.725.000,00	5.334.614.460,00	91,77
2	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000,00	1.353.795.000,00	90,25
3	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.896.169.880,00	94,81
4	DAK Non Fisik-BOS Afiriasi	-	-	0,00
5	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.725.000.000,00	5.702.500.000,00	99,61
6	DAK Non Fisik-BOS Regular	513.135.680.000,00	499.274.457.101,00	97,30
7	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	820.752.000,00	820.076.800,00	99,92
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	301.800.000,00	252.624.811,00	83,71
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	2.321.809.159,00	95,94
10	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.945.000.000,00	49,21
11	DAK Non Fisik-TKG PNSD	25.072.997.000,00	7.577.702.424,00	30,22
12	DAK Non Fisik-TPG PNSD	228.244.450.000,00	221.581.519.605,00	97,08
Jumlah		805.241.368.000,00	756.060.269.240,00	93,89

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasinya melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LRA

Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pemerintah Pusat	Rp13.956.241.000,00	Rp7.439.612.000,00
Lainnya –LRA		

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp13.956.241.000,00	Rp7.439.612.000,00

Dana Insentif Daerah terealisasi senilai Rp13.956.241.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan senilai Rp6.516.629.000,00 atau 46,69 dari tahun 2021.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp8.898.824.543,00	Rp73.758.777.275,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA berupa Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp8.898.824.543,00 atau 143,61% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp6.196.425.326,00.



1) Pendapatan Hibah-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp8.898.824.543,00	Rp73.758.777.275,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA merupakan Pendapatan Hibah-LRA yang terealisasi senilai Rp8.898.824.543,00 atau 143,61% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp6.196.425.326,00 dengan rincian:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, terealisasi senilai Rp6.971.444.543,00.
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi senilai Rp1.179.300.000,00.
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi senilai Rp748.080.000,00.

2. Belanja

Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp4.816.652.654.356,79	Rp5.508.767.906.132,69

Belanja Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp5.497.911.918.082,00 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp4.816.652.654.356,79 atau 87,61%. Belanja Daerah terdiri dari:

Tabel 5.14 Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	88,32
Belanja Modal	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99
Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89
Transfer	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27
Jumlah	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	87,61

Belanja Daerah tersebar di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.051.851.164.202,45	Rp4.061.962.995.625,69

Belanja Operasi terealisasi senilai Rp3.051.851.164.202,45 atau 88,32% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp3.455.350.145.016,00 terdiri dari:

1) Belanja Pegawai	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.421.874.102.462,37	Rp1.608.464.234.033,00

Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.421.874.102.462,37 atau 86,38% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.646.033.430.742,00. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.15 Realisasi Belanja Pegawai

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	961.280.227.200,00	847.076.797.712,00	88,12
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	106.041.362.140,00	92.237.920.199,01	86,98
3	Dinas Kesehatan	24.552.111.000,00	21.130.384.420,00	86,06
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	29.186.699.402,00	25.709.621.637,00	88,09
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.806.430.000,00	10.073.217.439,00	85,32
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.201.147.000,00	4.454.514.772,00	85,64
7	Dinas Sosial	17.342.947.000,00	15.305.108.036,00	88,25
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.858.451.000,00	4.096.523.821,00	84,32
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79.587.438.000,00	67.799.793.791,00	85,19
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.769.460.000,00	5.067.937.565,00	87,84
11	Dinas Perhubungan	12.620.166.000,00	10.759.576.372,00	85,26
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.185.986.000,00	6.073.682.944,00	84,52
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.448.843.000,00	15.477.219.655,00	75,69
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.041.580.000,00	5.710.919.935,00	81,10
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.613.158.000,00	8.203.800.019,00	85,34
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.315.749.000,00	8.626.034.745,00	83,62
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.835.972.000,00	11.132.944.192,00	86,73
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.187.563.000,00	6.619.809.778,00	80,85
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.263.975.000,00	29.898.463.501,00	87,26
20	Dinas Peternakan	16.663.572.000,00	14.046.565.551,00	84,30
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10.802.454.000,00	9.390.239.750,00	86,93
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.122.122.000,00	6.174.691.428,00	86,70
23	Sekretariat Daerah	45.605.264.000,00	39.792.948.645,00	87,26
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	70.894.069.000,00	68.385.423.139,00	96,46
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.213.591.000,00	9.042.925.407,00	74,04
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	63.055.680.000,00	37.950.248.051,36	60,19
27	Badan Keuangan Daerah	7.369.928.000,00	6.367.745.355,00	86,40
28	Badan Kepegawaian Daerah	8.921.092.000,00	7.221.687.534,00	80,95
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.178.093.000,00	8.296.091.186,00	68,12
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.484.402.000,00	3.902.482.513,00	87,02
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.090.960.000,00	2.520.582.999,00	81,55
32	Inspektorat Daerah	10.819.450.000,00	9.173.990.052,00	84,79
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.673.489.000,00	4.154.210.319,00	88,89
Jumlah		1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	86,38

2) **Belanja Barang dan Jasa** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.208.109.064.095,84 **Rp1.078.288.386.249,19**

Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai Rp1.208.109.064.095,84 atau 88,49% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.365.259.860.911,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	428.757.218.645,00	393.248.989.047,10	91,72
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	180.864.469.857,00	151.144.357.209,93	83,57
3	Dinas Kesehatan	191.002.924.790,00	162.440.666.006,00	85,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	31.495.465.811,00	24.141.800.856,39	76,65
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.072.654.100,00	2.901.776.550,00	94,44
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.146.528.264,00	2.847.792.878,00	90,51



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Dinas Sosial	21.687.461.520,00	18.440.779.041,00	85,03
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.440.985.790,00	1.842.192.508,00	75,47
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.904.056.681,00	25.823.633.289,42	83,56
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.351.468.778,00	29.615.405.379,00	97,57
11	Dinas Perhubungan	9.580.413.544,00	9.474.994.889,00	98,90
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.592.362.881,00	2.983.162.693,00	83,04
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.863.049.297,00	8.021.546.431,00	90,51
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.997.229.980,00	2.725.730.419,00	90,94
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19.983.001.796,00	18.949.069.233,00	94,83
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.234.381.570,00	2.594.959.303,00	80,23
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.695.246.101,00	11.052.797.175,00	94,51
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.176.206.913,00	3.926.907.048,00	94,03
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.754.600.749,00	24.555.766.174,00	91,78
20	Dinas Peternakan	20.132.647.905,00	13.931.948.745,00	69,20
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	9.655.502.971,00	8.650.189.334,00	89,59
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.323.358.970,00	8.004.035.500,00	96,16
23	Sekretariat Daerah	72.546.054.241,00	67.987.704.226,00	93,72
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	94.497.615.719,00	82.903.028.285,00	87,73
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.973.969.747,00	8.134.215.017,00	81,55
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	41.695.772.684,00	36.593.109.369,00	87,76
27	Badan Keuangan Daerah	31.689.989.203,00	29.276.623.886,00	92,38
28	Badan Kepegawaian Daerah	4.049.740.048,00	3.884.790.708,00	95,93
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.289.266.193,00	32.063.892.296,00	85,99
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	890.675.242,00	885.465.636,00	99,42
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.043.962.700,00	4.888.351.926,00	96,91
32	Inspektorat Daerah	6.673.300.251,00	6.595.710.960,00	98,84
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.198.277.970,00	7.577.672.078,00	92,43
Jumlah		1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	88,49

3) **Belanja Bunga** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp54.539.281.319,24 **Rp17.483.698.421,50**

Belanja Bunga direalisasi senilai Rp54.539.281.319,24 atau 73,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp74.472.320.130,00. Belanja Bunga merupakan pembayaran kewajiban Bunga kepada PT Bank NTT senilai Rp4.027.026.646,24 dan PT SMI senilai Rp39.404.449.121,00 (SMI - Reguler senilai Rp3.761.490.561,00 dan SMI-PEN senilai Rp35.642.958.560,00) ditambah biaya pengelolaan senilai Rp1.299.032.319,00 dan biaya provisi senilai Rp9.808.773.233,00. Khusus untuk pembayaran bunga senilai Rp35.642.958.560,00 kepada PT SMI-PEN dibayarkan melalui mekanisme potong Dana Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan angka belanja bunga, biaya pengelolaan dan biaya provisi adalah sebagai berikut:

a) PT Bank NTT

Tabel 5.17 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT Bank NTT

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
		71.958.361.000,20			
1	Januari 2022	71.958.361.000,20	5.996.530.083,35	641.710.863,17	6.638.240.946,52
2	Februari 2022	65.961.830.916,85	5.996.530.083,35	531.308.994,23	6.527.839.077,58



No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
3	Maret 2022	59.965.300.833,50	5.996.530.083,35	534.759.052,64	6.531.289.135,99
4	April 2022	53.968.770.750,15	5.996.530.083,35	465.757.884,56	6.462.287.967,91
5	Mei 2022	47.972.240.666,80	5.996.530.083,35	427.807.242,11	6.424.337.325,46
6	Juni 2022	41.975.710.583,45	5.996.530.083,35	362.256.132,43	6.358.786.215,78
7	Juli 2022	35.979.180.500,10	5.996.530.083,35	320.855.431,58	6.317.385.514,93
8	Agustus 2022	29.982.650.416,75	5.996.530.083,35	267.379.526,32	6.263.909.609,67
9	September 2022	23.986.120.333,40	5.996.530.083,35	207.003.504,25	6.203.533.587,60
10	Oktober 2022	17.989.590.250,05	5.996.530.083,35	160.427.715,79	6.156.957.799,14
11	November 2022	11.993.060.166,70	5.996.530.083,35	103.501.752,12	6.100.031.835,47
12	Desember 2022	5.996.530.083,35	4.934.506.887,05	4.258.547,04	4.938.765.434,09
Total Kewajiban Angsuran 2022			70.896.337.803,90	4.027.026.646,24	74.923.364.450,14

b) PT SMI – Reguler

Tabel 5.18 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI - Reguler

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
		138.057.208.086,00			
1	Januari 2022	138.055.208.086,00	-	-	-
2	Februari 2022	138.055.208.086,00	46.019.069.364,00	1.864.124.333,00	47.883.193.697,00
3	Maret 2022	92.036.138.722,00	-	-	-
4	April 2022	92.036.138.722,00	-	-	-
5	Mei 2022	92.036.138.722,00	46.019.069.364,00	1.210.506.053,00	47.229.575.417,00
6	Juni 2022	46.019.069.358,00	-	-	-
7	Juli 2022	46.019.069.358,00	-	-	-
8	Agustus 2022	46.019.069.358,00	46.019.069.358,00	686.860.175,00	46.705.929.533,00
9	September 2022	0,00	-	-	-
10	Oktober 2022	0,00	-	-	-
11	November 2022	0,00	-	-	-
12	Desember 2022	0,00	-	-	-
Total Kewajiban Angsuran 2022			138.057.208.086,00	3.761.490.561,00	141.816.698.647,00

c) PT SMI – PEN

Tabel 5.19 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Biaya Provisi (Rp)	Bunga (Rp)	Total Anggsuran (Rp)
		250.778.440.000,00				
1	Januari 2022	250.778.440.000,00				-
2	Februari 2022	250.778.440.000,00			1.983.518.139,00	1.983.518.139,00
3	Maret 2022	250.778.440.000,00			3.380.604.828,00	3.380.604.828,00
4	April 2022	702.179.632.000,00			3.742.812.489,00	3.742.812.489,00
5	Mei 2022	702.179.632.000,00			3.622.076.601,00	3.622.076.601,00
6	Juni 2022	702.179.632.000,00			-	-
7	Juli 2022	702.179.632.000,00			1.698.926.406,00	1.698.926.406,00
8	Agustus 2022	702.179.632.000,00	1.299.032.319,00		5.346.874.984,00	6.645.907.303,00



No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Biaya Provisi (Rp)	Bunga (Rp)	Total Anggsuran (Rp)
9	September 2022	702.179.632.000,00			5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
10	Oktober 2022	980.877.323.256,00		9.808.773.233,00	5.174.395.145,00	14.983.168.378,00
11	November 2022	980.877.323.256,00			5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
12	Desember 2022	980.877.323.256,00	-			-
Total Kewajiban Tahun 2022			1.299.032.319,00	9.808.773.233,00	35.642.958.560,00	46.750.764.112,00

4) Belanja**31 Desember 2022****31 Desember 2021****Hibah****Rp335.277.916.325,00****Rp1.347.483.386.922,00**

Belanja Hibah direalisasi senilai Rp335.277.916.325,00 atau 104,10% dari target yang ditetapkan senilai Rp322.074.233.233,00 yang dianggarkan pada beberapa perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut: **Tabel 5.20**

Realisasi Belanja Hibah per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	223.014.455.867,00	242.831.676.241,00	108,89
2	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63.915.257.916,00	59.417.984.312,00	92,96
4	Dinas Sosial	450.000.000,00	399.311.500,00	88,74
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.082.198.650,00	3.082.198.650,00	100,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	105.000.000,00	-	-
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.850.000.000,00	14.249.924.822,00	95,96
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	100,00
10	Sekretariat Daerah	8.630.500.000,00	7.270.000.000,00	84,24
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.926.820.800,00	2.926.820.800,00	100,00
Jumlah		322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	104,10

a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi senilai Rp158.962.148.484,00 atau 95,53% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp166.398.098.416,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:

1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp16.799.236.322,00 atau 95,86% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp17.525.000.000,00 dalam bentuk Hibah uang.
2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi senilai Rp135.642.912.162,00 atau 96,23% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp140.962.598.416,00 dengan rincian Belanja Hibah uang senilai Rp7.032.198.650,00 dan Belanja Hibah barang senilai Rp128.610.713.512,00.



Diantaranya terdapat realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas PUPR senilai Rp59.417.984.312,00 bersumber dari Dana Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam bentuk Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik di beberapa desa pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, dan lokasi Pulau Timor dengan menggunakan mekanisme pembayaran SP2D-Langsung kepada penyedia sesuai Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik terdiri dari Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum, dan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut. Belanja Hibah Barang pada Dinas PUPR yang belum diserahkan masih tercatat dalam Neraca pada akun Persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp54.176.447.312,00. Masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.241.537.000,00 (Rp59.417.984.312,00 - Rp54.176.447.312,00)

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi senilai Rp6.520.000.000,00 atau 83,05% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7850.500.000,00 yang merupakan Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
4. Belanja Hibah uang kepada Koperasi tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp60.000.000,00
- b) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta terealisasi senilai Rp173.638.947.041,00 atau 113,49% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp152.999.314.017,00 yaitu untuk satuan pendidikan menengah swasta (SMA/SMK/SLB) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi senilai Rp.173.524.987.041,00 dan untuk satuan pendidikan dasar (SDN/SMPN) yang merupakan kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp113.960.000,00 merupakan sisa dana BOS Tahun 2019 yang yang disalurkan untuk Satdikdas dan baru disalurkan pada tahun 2022 melalui pemotongan Dana DAU dari Pemerintah Pusat.

- c) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai politik terealisasi senilai Rp2.676.820.800,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.676.820.800,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	255.742.800,00	255.742.800,00	100,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	187.510.800,00	187.510.800,00	100,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	424.128.000,00	424.128.000,00	100,00
4	Partai Golongan Karya	419.671.200,00	419.671.200,00	100,00
5	Partai Nasional Demokrat	370.584.000,00	370.584.000,00	100,00



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Partai Persatuan Indonesia	179.648.400,00	179.648.400,00	100,00
7	Partai Persatuan Pembangunan	65.728.800,00	65.728.800,00	100,00
8	Partai Solidaritas Indonesia	121.995.600,00	121.995.600,00	100,00
9	Partai Amanat Nasional	249.236.400,00	249.236.400,00	100,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	201.205.200,00	201.205.200,00	100,00
11	Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	100,00
Jumlah		2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	100,00

5) **Belanja Bantuan Sosial** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp32.050.800.000,00 **Rp10.243.290.000,00**

Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp32.050.800.000,00 atau 67,46% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp47.510.300.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Sosial	27.551.000.000,00	21.111.000.000,00	76,63
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.280.000.000,00	2.725.000.000,00	83,08
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	280.000.000,00	270.000.000,00	96,43
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00
5	Sekretariat Daerah	13.272.980.000,00	4.818.480.000,00	36,30
6	Badan Keuangan Daerah	2.856.320.000,00	2.856.320.000,00	100,00
Jumlah		47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	67,46

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu terealisasi senilai Rp1.502.480.000,00 atau 99,37% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp1.511.980.000,00.
2. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp2.500.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi senilai Rp24.597.000.000,00 atau 71,32% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp34.489.500.000,00.
4. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) terealisasi senilai Rp5.951.320.000,00 atau 51,72% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp11.506.320.000,00.
5. Belanja Bansos Uang berupa Beasiswa Lanjutan Pendidikan dan Bantuan Modal Usaha Pasca Pelatihan pada Dinas Sosial kepada 87 penerima senilai Rp381.000.000,00 sampai dengan tanggal 14 April 2023 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

**b. Belanja Modal****Belanja Modal****31 Desember 2022****31 Desember 2021****Rp1.216.802.446.597,34****Rp903.257.622.800,00**

Belanja Modal terealisasi senilai Rp1.216.802.446.597,34 atau 90,99% dari yang direncanakan senilai Rp1.337.288.801.433,00 dengan rincian belanja modal sebagai berikut:

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	74,25
2	Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64
3	Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73
5	Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83
Jumlah		1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99

1) Belanja Modal Tanah**31 Desember 2022****31 Desember 2021****Rp1.050.294.656,00****Rp147.952.000,00**

Belanja Modal Tanah terealisasi senilai Rp1.050.294.656,00 atau 74,25% dari yang direncanakan senilai Rp1.414.598.600,00 merupakan belanja Tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

2) Belanja Modal**31 Desember 2022****31 Desember 2021****Peralatan dan Mesin****Rp144.284.448.880,00****Rp185.901.613.833,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp144.284.448.880,00 atau 93,64% dari yang direncanakan senilai Rp154.087.978.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.015.402.264,00	94.495.654.129,00	97,40
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	29.912.990.300,00	26.288.083.920,00	87,88
3	Dinas Kesehatan	3.216.694.887,00	2.512.749.667,00	78,12
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.425.274.430,00	4.863.630.325,00	75,70
5	Satuan Polisi Pamong Praja	29.932.500,00	28.750.000,00	96,05
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	159.346.500,00	158.861.800,00	99,70
7	Dinas Sosial	511.620.440,00	414.270.180,00	80,97
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73.005.200,00	42.327.009,00	57,98
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	186.696.600,00	134.072.100,00	71,81
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	145.095.900,00	144.846.500,00	99,83
11	Dinas Perhubungan	2.836.080.783,00	2.605.308.537,00	91,86
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.935.880,00	189.575.036,00	85,81



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	131.021.320,00	87.106.000,00	66,48
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.232.050,00	-	-
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	98.964.200,00	45.868.600,00	46,35
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	525.768.410,00	497.300.427,00	94,59
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.085.030.600,00	2.028.861.275,00	97,31
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	32.820.300,00	25.741.650,00	78,43
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	209.476.100,00	203.789.025,00	97,29
20	Dinas Peternakan	97.824.750,00	97.819.500,00	99,99
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	26.007.272,00	26.007.272,00	100,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.350.200,00	26.295.900,00	99,79
23	Sekretariat Daerah	1.271.996.738,00	1.149.901.730,00	90,40
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	450.989.200,00	428.110.000,00	94,93
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.858.785,00	-	-
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	6.221.483.800,00	5.826.981.059,00	93,66
27	Badan Keuangan Daerah	449.778.980,00	444.773.669,00	98,89
28	Badan Kepegawaian Daerah	440.770.850,00	436.690.020,00	99,07
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	478.729.042,00	410.823.750,00	85,82
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	50.490.000,00	50.490.000,00	100,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	216.737.300,00	216.696.100,00	99,98
32	Inspektorat Daerah	429.073.200,00	403.063.700,00	93,94
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.500.000,00	-	-
Jumlah		154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp141.655.437.253,34 **Rp135.344.543.385,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp141.655.437.253,34 atau 86,69% dari yang direncanakan senilai Rp163.410.778.708,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.726.451.985,00	120.141.859.800,00	99,52
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	19.243.075.083,00	-	-
3	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	74.880.000,00	99,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	174.954.500,00	-	-
5	Dinas Sosial	350.000.000,00	349.312.456,34	99,80
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	292.678.000,00	291.805.381,00	99,70
7	Dinas Perhubungan	570.008.600,00	551.869.000,00	96,82
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.167.000.000,00	15.230.631.900,00	94,21
9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	460.000.000,00	440.547.729,00	95,77
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	400.000.000,00	329.616.000,00	82,40
11	Dinas Peternakan	2.687.500.000,00	2.061.498.671,00	76,71
12	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	315.000.000,00	311.534.946,00	98,90
13	Sekretariat Daerah	303.750.000,00	303.119.000,00	99,79
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.167.485.020,00	1.154.176.250,00	98,86
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	220.652.000,00	220.652.000,00	100,00



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	62.873.400,00	-	-
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	194.350.120,00	193.934.120,00	99,79
Jumlah		163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2022**
Rp909.704.835.562,00 **31 Desember 2021**
Rp572.412.496.697,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi senilai Rp909.704.835.562,00 atau 92,73% dari yang direncanakan senilai Rp981.024.597.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	750.400.000,00	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	944.640.110.604,00	875.944.600.955,00	92,73
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57.322.000,00	56.969.564,00	99,39
4	Dinas Perhubungan	28.992.860.000,00	27.426.328.758,00	94,60
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.400.000.000,00	6.106.431.000,00	95,41
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	128.243.583,00	117.038.000,00	91,26
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.661.750,00	53.467.285,00	96,06
Jumlah		981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2022**
Rp20.107.430.246,00 **31 Desember 2021**
Rp9.451.016.885,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp20.107.430.246,00 atau 53,83% dari yang direncanakan senilai Rp37.350.847.407,00 dengan rincian:

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.793.255.747,00	19.605.073.206,00	54,77
2	Dinas Kesehatan	103.619.620,00	99.700.000,00	96,22
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	215.000.000,00	198.957.000,00	92,54
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.722.040,00	15.722.040,00	100,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	49.728.000,00	99,46
6	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
8	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.075.000.000,00	40.000.000,00	3,72
9	Badan Keuangan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Jumlah		37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga **31 Desember 2022**
Rp7.228.173.756,00 **31 Desember 2021**
Rp135.775.036.685,00



Belanja Tidak Terduga terealisasi senilai Rp7.228.173.756,00 atau 22,89% dari yang direncanakan senilai Rp31.577.104.119,00. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang disiapkan untuk keperluan darurat mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga mengalami Penurunan senilai (Rp128.526.862.929,00) atau (94,68) dari tahun 2021. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk:

- 1) Penanganan Darurat Bencana senilai Rp127.115.000,00 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2) Penanganan Keperluan Mendesak senilai Rp6.746.754.507,00 yang terdiri dari:
 - a) Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. NTT senilai Rp6.879.248.000,00, dengan realisasi senilai Rp3.328.213.950,00 dan penyetoran kembali ke Kas Daerah senilai Rp3.551.034.050 yang terdiri dari:
 - Kegiatan Kunjungan Kenegaraan Presiden Demokratik Timor-Leste ke Kota Kupang dan Labuan Bajo senilai Rp1.414.071.820,00
 - Perjalanan Rombongan Delegasi Budaya Nusa Tenggara Timur ke Jenewa-Swiss senilai Rp598.018.740,00
 - Kegiatan Proses Pelayanan dan penanganan Jenazah Pejabat Negara Bapak Domu Warandoy senilai Rp1.316.123.390,00
 - b) Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.915.079.371,00, terdiri dari:
 - Kegiatan Penanganan dan Penertiban Aset di kawasan Besipae kecamatan Amanuban Selatan senilai Rp120.000.000,00
 - Kegiatan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor UPTD Flore Timur senilai Rp1.795.079.371,00
 - c) Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. NTT senilai Rp544.666.186,00 terdiri dari:
 - Kegiatan Pembiayaan Penanganan Perkara Perdata senilai Rp169.666.186,00
 - Kegiatan Pembayaran Tanggung Renteng senilai Rp375.000.000,00
 - d) Badan penghubung Prov. NTT senilai Rp854.930.000,00 untuk kegiatan Revitalisasi Bangunan Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah.
 - e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp103.865.000,00 dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah melalui penyediaan cadangan stok Hortikultura.
- 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya senilai Rp354.304.249,00, terdiri dari:
 - Restitusi Pembayaran Angsuran Rumah Dinas an. Barnabas L. Wangge, SH senilai Rp180.052.000,00



- Pengembalian kelebihan setor ke Kasda (Gaji 13 dan THR) senilai Rp8.037.400,00
- Pengembalian Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang tidak digunakan Tahun Anggaran 2017 dan 2020 senilai Rp166.214.849,00

d. Transfer**Transfer**

31 Desember 2022
Rp540.770.869.801,00

31 Desember 2021
Rp407.772.251.022,00

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer terealisasi senilai Rp540.770.869.801,00 atau 80,27% dari yang direncanakan senilai Rp673.695.867.514,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Realisasi Transfer

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	80,44	397.772.251.022,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	74,00	10.000.000.000,00
Jumlah		673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27	407.772.251.022,00

1) Transfer Bagi Hasil

31 Desember 2022
Rp527.502.869.801,00

31 Desember 2021
Rp397.772.251.022,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan senilai Rp655.767.227.614,00 terealisasi senilai Rp527.502.869.801,00 atau 80,44% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp69.649.319.705,00 atau 44,50% dari anggaran yang dianggarkan senilai Rp156.500.837.125,00. Dari total realisasi senilai Rp69.649.319.705,00 terdiri dari realisasi bagi hasil tahun 2022 senilai Rp34.769.979.936,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp34.879.339.769,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.29 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	47.073.503.120,00	9.338.150.579,00	19,84
2	Kabupaten Alor	4.123.186.960,00	2.188.556.993,00	53,08
3	Kabupaten Belu	7.183.878.314,00	4.131.109.192,00	57,51
4	Kabupaten Ende	6.432.858.942,00	3.343.971.963,00	51,98
5	Kabupaten Flores Timur	4.756.029.767,00	2.723.517.944,00	57,26
6	Kabupaten Kupang	7.141.234.356,00	3.990.238.857,00	55,88
7	Kabupaten Lembata	4.158.484.401,00	2.282.152.194,00	54,88
8	Kabupaten Malaka	4.402.034.395,00	2.585.002.900,00	58,72
9	Kabupaten Manggarai Barat	5.606.778.211,00	3.051.058.851,00	54,42
10	Kabupaten Manggarai	7.245.436.927,00	3.778.452.819,00	52,15
11	Kabupaten Manggarai Timur	4.607.587.066,00	2.415.100.645,00	52,42



No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah	Realisasi	%
12	Kabupaten Nagekeo	4.192.675.396,00	2.301.478.438,00	54,89
13	Kabupaten Ngada	4.704.988.381,00	2.650.287.226,00	56,33
14	Kabupaten Rote Ndao	4.011.454.282,00	2.437.088.817,00	60,75
15	Kabupaten Sabu Raijua	3.388.416.520,00	1.956.284.302,00	57,73
16	Kabupaten Sikka	7.229.548.758,00	3.517.830.066,00	48,66
17	Kabupaten Sumba Barat	4.232.400.321,00	2.445.920.954,00	57,79
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	4.197.183.597,00	2.397.693.552,00	57,13
19	Kabupaten Sumba Tengah	3.320.451.672,00	1.834.820.797,00	55,26
20	Kabupaten Sumba Timur	5.671.346.878,00	3.067.399.058,00	54,09
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	6.883.739.232,00	3.820.149.888,00	55,50
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	5.937.619.629,00	3.393.053.670,00	57,15
Jumlah		156.500.837.125,00	69.649.319.705,00	44,50

- 2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp33.568.719.525,00 atau 54,07% dari yang dianggarkan senilai Rp62.084.527.895,00. Realisasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2022 senilai Rp4.351.697.595,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp29.217.021.930,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.30 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.357.539.613,00	10.579.808.917,00	68,89
2	Kabupaten Alor	1.737.269.502,00	731.413.737,00	42,10
3	Kabupaten Belu	2.943.629.293,00	1.490.123.283,00	50,62
4	Kabupaten Ende	2.503.577.897,00	1.210.233.469,00	48,34
5	Kabupaten Flores Timur	2.095.996.464,00	960.029.923,00	45,80
6	Kabupaten Kupang	3.247.523.862,00	2.020.958.909,00	62,23
7	Kabupaten Lembata	1.823.699.040,00	773.360.430,00	42,41
8	Kabupaten Malaka	2.063.768.060,00	1.339.082.773,00	64,89
9	Kabupaten Manggarai Barat	2.779.099.204,00	1.190.098.141,00	42,82
10	Kabupaten Manggarai	2.865.057.565,00	1.322.523.228,00	46,16
11	Kabupaten Manggarai Timur	1.938.733.986,00	890.678.351,00	45,94
12	Kabupaten Nagekeo	1.757.638.394,00	837.503.882,00	47,65
13	Kabupaten Ngada	1.799.503.734,00	770.852.435,00	42,84
14	Kabupaten Rote Ndao	1.702.251.803,00	712.869.989,00	41,88
15	Kabupaten Sabu Raijua	1.541.118.609,00	725.029.564,00	47,05
16	Kabupaten Sikka	3.141.216.925,00	1.553.783.099,00	49,46
17	Kabupaten Sumba Barat	1.587.299.662,00	658.886.984,00	41,51
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	1.697.766.134,00	713.706.011,00	42,04
19	Kabupaten Sumba Tengah	1.414.157.666,00	576.834.868,00	40,79
20	Kabupaten Sumba Timur	2.110.009.816,00	1.575.678.932,00	74,68
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.241.216.889,00	1.565.796.709,00	48,31
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.736.453.777,00	1.369.465.891,00	50,05
Jumlah		62.084.527.895,00	33.568.719.525,00	54,07

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp126.309.596.249,00 atau 74,59% dari yang dianggarkan senilai Rp169.329.149.223,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2022 senilai Rp46.916.746.416,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp79.392.849.833,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.31 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	41.117.267.409,00	23.322.543.489,00	56,72
2	Kabupaten Alor	5.616.273.840,00	4.439.595.755,00	79,05
3	Kabupaten Belu	7.016.814.346,00	5.733.327.839,00	81,71
4	Kabupaten Ende	7.026.390.624,00	5.432.368.612,00	77,31
5	Kabupaten Flores Timur	6.255.459.242,00	4.895.334.718,00	78,26
6	Kabupaten Kupang	6.064.526.361,00	5.533.706.507,00	91,25
7	Kabupaten Lembata	4.740.299.658,00	3.912.693.279,00	82,54
8	Kabupaten Malaka	4.782.923.413,00	3.796.112.067,00	79,37
9	Kabupaten Manggarai Barat	7.622.752.223,00	5.996.629.647,00	78,67
10	Kabupaten Manggarai	8.320.912.602,00	6.757.369.823,00	81,21
11	Kabupaten Manggarai Timur	5.485.991.168,00	4.415.289.484,00	80,48
12	Kabupaten Nagekeo	5.504.130.951,00	4.302.947.801,00	78,18
13	Kabupaten Ngada	5.545.022.958,00	4.529.381.069,00	81,68
14	Kabupaten Rote Ndao	4.653.118.171,00	3.731.063.776,00	80,18
15	Kabupaten Sabu Raijua	3.950.935.487,00	3.231.184.690,00	81,78
16	Kabupaten Sikka	8.961.690.513,00	7.460.999.116,00	83,25
17	Kabupaten Sumba Barat	5.758.661.546,00	4.403.305.643,00	76,46
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	5.438.103.636,00	4.538.981.717,00	83,47
19	Kabupaten Sumba Tengah	4.374.513.827,00	3.702.576.925,00	84,64
20	Kabupaten Sumba Timur	7.823.812.816,00	6.200.190.524,00	79,25
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	6.996.799.544,00	4.930.044.562,00	70,46
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	6.272.748.888,00	5.043.949.206,00	80,41
Jumlah		169.329.149.223,00	126.309.596.249,00	74,59

- 4) Pajak Rokok terealisasi senilai Rp297.609.050.445,00 dari yang dianggarkan senilai Rp267.473.528.329,00 atau 111,27%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.32 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.909.991.000,00	17.406.087.199	109,40
2	Kabupaten Alor	11.163.955.642,00	12.528.367.946,00	112,22
3	Kabupaten Belu	11.607.494.641,00	12.794.293.855,00	110,22
4	Kabupaten Ende	12.590.140.250,00	14.809.910.107,00	117,63
5	Kabupaten Flores Timur	12.399.563.933,00	15.160.405.951,00	122,27